Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 11 No. 4 Tahun 2026, pp. 976 – 1003
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v11i4.7572
■ Received 12/07/2026 ■ Revised 24/09/2026 ■ Accepted 25/09/2026

Governance Strategies for Building Coastal Resilience to Tidal Flooding in Bontang Kuala Village

Aulia Rahmani Pasha*[1)], Hashfi Rafdi[1)], Anwar Alaydrus[1)], Widya Astuti[1)]
[1)]Universitas Mulawarman
Samarinda, Indonesia

Email correstpondence: auliarahmanipasha@gmail.com*

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the measures taken by the local government to address tidal flooding in Bontang Kuala Village, as well as to recommend strategies that can be developed by the government and the community to enhance the resilience of the coastal area against tidal flooding in Bontang Kuala Village.

Design/methodology/approach: This Study employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. Informants included government officials involved in tidal flooding mitigation, ranging from Bontang Kuala Village officials to the regional disaster management agency, the department of public works and spatial planning, the department of the environment, and the residents of Bontang Kuala Village.

Findings: This study found that, while the government has undertaken various efforts to manage tidal flooding in Bontang Kuala Village, it still faces several challenges. Through a SWOT analysis, this study developed strategies that emphasize strengthening collaboration, enhancing adaptation, and developing policies to build coastal resilience.

Practical Implication: This study can encourage greater cooperation between government agencies and the community in managing tidal flooding, thereby fostering better collaboration in efforts to build coastal resilience against tidak flooding.

Originality/value: This study offers a novel approach by integrating the concepst of governance and coastal resilience through SWOT analysis to formulate strategies for managing tidak flooding. This study offers the perspective that tidal flooding management should not only focus on infrastructure development but also require collaborative, adaptive, and sustainable governance.

Keywords: Tidal flooding, good governance, coastal resilience, SWOT

Paper type: Research Paper

Copyright (c) 2026 The Author(s).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Disclosure statement: The authors do not have any conflict of interest

Strategi Tata Kelola Pemerintahan dalam Membangun Ketahanan Wilayah Pesisir terhadap Banjir Rob di Kelurahan Bontang Kuala

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mengatasi banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala, serta merekomendasikan strategi yang bisa dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan ketahanan wilayah pesisir akibat banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala.

Desain/metodologi/pendekatan: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data yang didapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri atas pemerintah terkait dengan penanggulangan banjir rob. Mulai dari Kelurahan Bontang Kuala, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, serta masyarakat Kelurahan Bontang Kuala.

Temuan: Penelitian ini menemukan bahwa penanganan banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala telah melakukan berbagai upaya dari pemerintah, namun masih menghadapi beberapa kendala. Melalui analisis SWOT, penelitian ini menghasilkan strategi yang menekankan penguatan kolaborasi, peningkatan adapatasi, serta pengembangan kebijakan untuk membangun ketahanan wilayah pesisir.

Implikasi Praktis: Penelitian ini dapat mendorong peningkatan Kerjasama antara instansi pemerintah dan masyarakat dalam penanganan banjir rob, sehingga dapat menciptakan kolaborasi yang lebih baik dalam upaya membangun ketahanan wilayah pesisir terhadap banjir rob.

Originalitas/Nilai: Penelitian ini memiliki nilai kebaruan dengan mengintegrasikan konsep tata kelola pemerintahan dan ketahanan wilayah pesisir melalui analasis SWOT untuk merumuskan strategi penanganan banjir rob. Penelitian ini memberikan perspektif bahwa penanganan banjir rob tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memerlukan tata kelola kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Banjir rob, tata kelola pemerintahan, ketahanan pesisir, SWOT

Jenis Penelitian: Artikel Penelitian

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir Indonesia merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, namun wilayah ini juga rentan terhadap bencana-bencana yang mungkin akan terjadi pada wilayah pesisir salah satunya adalah banjir rob. Di Kalimatan Timur khususnya wilayah pesisir seperti Kota Bontang fenomena ini sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir dengan intensitas dan frekuensi yang meningkat setiap tahunnya akibat perubahan iklim dan menurunnya kualitas lingkungan pesisir.

Wilayah pesisir merupakan wilayah batasan anatara daratan dan lautan. Salah satu bencana yang mengancam wilayah pesisir adalah banjir yang disebabkan oleh kenaikan permukaan laut. Kenaikan permukaan laut berdampak luas pada lingkungan dan infrastruktur pesisir, daerah yang paling rentan terhadap kenaikan permukaan laut adalah dataran rendah pesisir (Nadya & Salim, 2023).

Banjir rob memberikan dampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur dan sarana wilayah namun juga pada social dan ekonomi masyarakat (Sauda et al., 2019). Banjir rob merupakan banjir yang airnya berasal dari air laut. Banjir rob ini adalah banjir yang di akibatkan oleh pasangnya air laut, sehingga air yang pasang tersebut menggenangi daratan (Sahana, 2021). Genangan banjir rob sering terjadi musiman di pesisir, dan bagi sebagian masyarakat hal ini dianggap sebagai fenomena biasa meskipun menimbulkan kerugian ekonomi. Kesadaran yang rendah mengenai dampak jangka panjang banjir rob menjadi tantangan besar dalam implementasi program mitigasi berbasis masyarakat (Nada et al., 2025).

Tabel 1. Jumlah Permasalahan Banjir di Kota Bontang

Kecamatan	Jumah Permasalahan Banjir
Bontang Utara	89
Bontang Barat	21
Bontang Selatan	17
Total	127

Sumber: Petakita.Bontangkota.Go.Id, 2025

Berdasarkan data diatas tercatat ada 127 lokasi permasalahan banjir dan kondisi ini menyebabkan Kota Bontang sebagai kota industri dan Kawasan pesisir menghadapi tantangan besar, jumlah titik banjir yang tersebar luas juga menunjukkan Kota Bontang cukup rentan terhadap bencana seperti banjir yang telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat.

Kelurahan Bontang Kuala merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Dengan jumlah penduduk yang

terus berkembang setiap tahunnya serta luas wilayah daratan yang relatif kecil dibandingkan dengan wilayah pemukiman berkembang di Kota Bontang (Musa & Lukman Hakim, 2020). Kelurahan Bontang Kuala adalah Kawasan pemukiman tradisional yang terletak di atas air dan menjadi daerah yang paling berdampak banji rob di Kota Bontang. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu kampung tua dengan karakteristik sosial budaya yang kuat. Namun, dalam beberapa tahun terkahir banjir rob menjadi permasalahan yang terus-menurus mengganggu kehidupan masyarakat. Hampir setiap bulan, air meluap hingga memasuki pemukiman warga dan menggenangi jalanan dan fasilitas umum.

Tabel 2. Persentase Luas Wilayah yang Terdampak Banjir di Kota Bontang

Jenis Banjir	Persentase
Banjir lokal	30.08%
Banjir kiriman	18.63%
Banjir rob	12.93%

Sumber: Petakita.Bontangkota.Go.Id, 2025

Luas wilayah yang terdampak banjir rob sebesar 12,93% meskipun lebih kecil dari persentase banjir kiriman dan banjir local dengan persentase 18,63% dan 30,08% namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan ancaman banjir rob. Melihat dampaknya sangat merugikan masyarakat terutama pada wilayah pesisir di Kelurahan Bontang Kuala.

Fenomena banjir rob ini mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat Bontang Kuala mulai dari fisik, ekonomi, sosial, serta budaya. Rumah dan infrastruktur rusak, intensitas banjir rob yang semakin meningkat dan mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari sehingga menghambat mobilitas dan produktivitas masyarakat.

Berdasarkan data laporan permasalahan banjir pada tabel 3 di Kelurahan Bontang Kuala, terdapat factor yang menunjukkan bahwa banjir rob yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan dalam infrastruktur dan pengelolaan lingkungan. Banjir rob di Bontang Kuala umumnya terjadi secara berkala, terutama saat fase bulan purnama atau Ketika pasang tinggi air laut bersamaan dengan curah hujan yang tinggi. Fenomena ini semakin menghawatirkan karena sifat banjir rob yang tidak hanya menyebabkan genangan sementara, tetapi dapat mengganggu system drainase, merusak infrastruktur, dan berdampak langsung pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Banjir rob adalah ancaman yang perlu dikelola secara strategis, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam merancang kebiajakan penanggulangan dan adaptasi yang menyuluruh, tidak hanya melakukan respon dan tanggapan darurat

pada saat banjir sudah datang. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting dalam penanganan banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala. Selain pemerintah, masyarakat juga memegang peran penting dalam membangun ketahanan wilayah pesisir.

Tabel 3. Laporan Permasalahan Banjir di Kelurahan Bontang Kuala

Lokasi	Laporan Permasalahan Banjir
Jl. Granit 3 Rt. 19	Drainase kecil, banjir rob selalu menggenangi rumah warga.
Jl. Batu Sahasa Rt. 02	Banjir Rob, rumah warga lebih rendah dari pasang rob.
Jl. Batu Sahasa Rt. 05	Banjir rob, rumah warga lebih rendah dari pasang air laut.
Jl. Basalt Rt. 15	Drainase kecil sehingga tidak bisa menampung luapan air suangi, banyak lahan kosong tidak terawat.
Jl. Batu Sahasa Rt. 03	Banjir rob
Jl. Boulevard Rt. 14	Air dari sungai ketika air laut pasang masuk ke pemukiman dan Jembatan rusak menghambat arus sungai saat air meluap.

Sumber: Petakita.Bontangkota.go.id, 2025

Ketahanan wilayah pesisir tidak akan terwujud apabila hanya dibebankan pada satu pihak. Kriteria yang dapat membentuk ketahanan wilayah pesisir bagi masyarakat menurut (Gunawan, 2023) adalah pemerintah sebagai unsur yang dapat memfasilitasi dan memberikan kondisi aman bagi masyarakat pesisir untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Dengan begitu ketahanan wilayah pesisir tidak dapat dibangun hanya oleh satu pihak, melainkan membutuhkan kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat.

Sebagai dasar pengembangan penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan banjir rob beserta strategi penanganannya yang pertama, penelitian (Widana, 2022) yang berjudul "Analisis Faktor dan Strategi Mitigasi Bencana Banjir Rob di Kota Banda Aceh". Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab banjir rob di Banda Aceh serta strategi mitigasi seperti penanaman mangrove, pembentukan komunitas siaga bencana, peta bahaya, dan pengendalian izin bangunan di kawasan serapan air. Penelitian terdahulu yang kedua berjudul "Pengembangan Model Mitigasi Bencana Banjir Rob di Kelurahan Kandang Panjang, Kota Pekalongan (Analisis Kapasitas dan Kerentanan Aktor Pada Mitigasi Bencana Banjir Rob). Penelitian ini menunjukkan mitigasi bencana difokuskan pada analisis kapasitas dan kerentanan aktor, dengan rekomendasi utama berupa model mitigasi

non-struktural berbasis masyarakat (Hidayah et al., 2024). Penelitian terdahulu yang ketiga berjudul "Strategi Penanganan Banjir Rob Kota Pekalongan". Penelitian ini menunjukkan perlunya kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, daerah, pelibatan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem drainase sebagai upaya utama dalam mengurangi dampak banjir rob (Miftakhudin, 2021). Penelitian terdahulu yang keempat berjudul "Mitigasi dan Adaptasi Bencana Banjir Rob di Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare". Penelitian ini berfokus pada mitigasi dan adaptasi banjir rob di Kelurahan Cappa Galung, Kota Parepare dengan pendekatan kuantitatif melalui analisis kerentanan spasial berbasis GIS dan penentuan prioritas strategi menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Hasil penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan tata ruang pesisir, pembangunan infrastruktur, serta penguatan partisipasi masyarakat sebagai strategi utama dalam mengurangi risiko banjir rob (Imam et al., 2025). Penelitian terdahulu yang kelima berjudul "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir Rob di Kota Semarang". Pada penelitian ini menyoroti bagaimana pemerintah kota mengimplementasikan kebijakan penanggulangan banjir rob dengan menekankan aspek regulasi, pembangunan infrastruktur, serta koordinasi antar *stakeholder*. Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan membangun 23 proyek infrastruktur (Zulfan & Mannar, 2024). Penelitian terdahulu keenam berjudul "*Analysis of Adaptation and Mitigation Recommendations for Banjir Rob Disasters in the Coastal Area of Belawan, Medan"*. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis faktor kerentanan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap banjir rob serta penyusunan rekomendasi adaptasi dan mitigasi berbasis peta kerentanan wilayah. Serta penelitian ini menekankan pembangunan fisik seperti rumah panggung, tanggul, pintu air, sistem polder, dan pembatasan pembangunan di wilayah pesisir (Eka Sarveleni et al., 2023). Penelitian terdahulu ketujuh berjudul "Strategi Masyarakat Pesisir Margolinduk dalam Penanganan Banjir Rob serta Implikasi terhadap Sikap Peduli Lingkungan". Penelitian ini berfokus pada strategi adaptasi masyarakat seperti meninggikan rumah, membuat tanggul sederhana, serta melakukan gotong royong untuk menjaga lingkungan (Bariroh & Surtikanti, 2024).

Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa Sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek mitigasi dan adaptasi bencana, implementasi kebijakan, analisis kerentanan wilayah, maupun strategi penanganan banjir rob yang menitikberatkan pada pendekatan teknis dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, penelitian ini menawarkan perspektif yang berada dengan menempatkan strategi tata kelola pemerintahan sebagai fokus utama dalam membangun ketahanan wilayah pesisir terhadap banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala. Penelitian ini tidak hanya mengkaji upaya pemerintah, tetapi juga menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman melalui analisis SWOT untuk merumuskan alternatif strategi. Dengan

demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tata kelola pemerintahan pada penanganan banjir rob.

Kemudian, penelitian ini menggunakan beberapa teori dan konsep sebagai landasan dalam menganalisis. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama, pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengelola sumber daya, mengatur pelayanan public, dan mengembangkan kebijakan yang lebih dekat dengan masyarakat (Br. Sembiring et al., 2023). Pemerintah daerah memiliki peran dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di Tingkat local atau daerah. Fungsi pemerintah daerah mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan publik hingga pembangunan dan pengaturan kehidupan sosial masyarakat (Achmad & Baharuddin Zubakhrum, 2024). Undang-undang No. 23 Tahun 2014 berkaitan dengan pencapaian tujuan desentralisasi, yoitu untuk menciptakan pemerintah yang lebih efektif, efisien, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan tujuan yang ingin dicapai untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi kesenjangan Pembangunan antar daerah, mendorong pemberdayaan daerah, menjamin keterpaduan dalam pemerintahan, dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Pemerintah daerah diberikan otonomi untuk mengelola urusan pemerintah di wilayah masing-masing, termasuk dalam sektor Pendidikan, Kesehatan, perencanaan Pembangunan, dan lainnya (Syahputra & Bakhri, 2025).

Kedua, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan dan menjalankan fungsi pelayanan publik oleh pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah atau negara, tetapi wajib melibatkan seluruh komponen baik swasta maupun masyarakat itu sendiri (Wibawa, 2019).

Secara umum, tata kelola pemerintahan yang baik adalah tata kelola pemerintahan di semua bidang pelayanan publik, seperti ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, dengan fokus pada kesejahteraan warga negara. Proses optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesi dikenal dengan istilah Tata Kelola Pemerintahan yang baik, yang berfokus pada manfaat dari fungsi pelayanan, pemgaturan, dan pemberdayaan. Tata kelola pemerintahan mencakup semua prosedur dan mekanisme yang digunakan untuk menjalankan operasi pemerintah, mulai dari perumusan kebijakan hingga bagaimana kebijakan tersebut di evaluasi (Choirulsyah & Azhar, 2024).

Good governance menurut World Bank di artikan sebagai penyelenggara pengelola atau manajemen dalam pemerintah secara solid dan akuntabel,

berdasarkan prinsip yang efisien dan juga pencegahan korupsi baik secara administrative maupun politis. *Good governance* membantu mengintegrasikan antar peran pemerintah, privat sektor, dan masyarakat untuk mencapai konsensus bersama, di mana dalam pelaksanaannya dapat di pertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efisien (Nurhidayat, 2023). Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prinsip fundamental yang memastikan proses pemerintahan berjalan secara adil, transparan, efisien dan akuntabel, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini mengacu pada penerapan kebijakan yang bersih, tidak korup, serta memastikan bahwa pemerintah beroperasi berdasarkan aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Cahyono et al., 2024).

Terdapat beberapa prinsip utama yang membentuk kerangka *good governance* menurut *United Nations Development Programe* (UNDP) dalam (Suriadi, 2025) menyebutkan sedikitnya ada delapan prinsip dasar, yaitu: partisipasi, supermasi hukum, transparansi, responsivitas, konsensus, kesetaraan dan inklusivitas, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas.

Ketiga, analisis strategi yang dimana strategi merupakan pola atau rencana yang mengintegritaskan tujuan utama organisasi, kebijakan, dan Tindakan menjadi satu kesatuan yang selaras. Dalam konteks pemerintah daerah, analisis strategi mencakup upaya sistematis untuk mengidentifikasi tujuan daerah, merumuskan kebijakan yang relevan, dan menyelaraskan sumber daya local untuk mencapai tujuan tersebut (Suhardi & Panjaitan, 2025).

Dalam penelitian ini menggunakan analisis SWOT yang merupakan suatu Teknik untuk menemukan sebuah penyelesaian dari suatu masalah, yang dilihat dari segi *Strenght* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Threat* (ancaman) (Permatasari et al., 2024). Analisis Swot merupan bentuk analisis situasi atau kondisi yang bersifat deskriptif, analisis ini menempatkan situasi atau kondisi sebagai faktor masukan sehingga dikelompokkan menurut kontribusi masing-masing (Zebua, 2024). Analisis ini didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman dan selalu berkaitan dengan pengembangan visi, tujuan, strategi dan kebijakan. Analisis SWOT dapat digunakan dengan berbagai cara untuk meningkatkan analisis dalam usaha penetapan strategi. Umumnya yang sering digunakan adalah sebagai kerangka atau panduan sistematis dalam diskusi untuk membahas kondisi alternatif dasar yang mungkin menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan (Irfani et al., 2021).

Dengan menggunakan analisis SWOT, maka pembahasan umum daerah atau suatu institusi baik yang menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman akan menjadi lebih tajam dan terarah kepada hal-hal yang berkaitan langsung dengan penyusunan perancanaan (Sasoko & Mahrudi, 2022). Analisis

SWOT dilakukan untuk melihat secara menyeluruh faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang ada. Dari hasil analisis tersebut dapat dirumuskan empat pilihan strategi, yaitu SO menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, WO meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, ST menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, dan yang terakhir WT meminimalkan kelemahan agar terhindar dari ancaman.

Tabel 4. Matriks SWOT

Internal / **Eksternal**	***Strength*** **(Kekuatan)**	***Weakness*** **(Kelemahan)**
Opportunity **(Peluang)**	**Strategi SO** Memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.	**Strategi WO** Strategi yang diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
Threat **(Ancaman)**	**Strategi ST** Strategi yang ditetapkan berdasarkan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman.	**Strategi WT** Strategi yang ditetapkan berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Sumber: (Sylvia & Hayati, 2023)

METODE PENELITIAN

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis strategi tata kelola pemerintahan dalam membangun ketahanan wilayah pesisir terhadap banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan buktu-buktinya (Abdussamad, 2021). Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena, dan situasi sosial yang diteliti. Penelitian kualitatif juga lebih mendalam karena didasarkan pada pengumpulan data secara

langsung, partisipan merupakan orang yang mengalami secara langsung konteks sosial objek penelitian (Waruwu, 2023).

Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih menggunakan purposive sampling. Dalam penentuan sampel biasanya didasarkan atas kriteria tertentu atau pertimbangan tertentu untuk mencapai tujuan dan tidak melalui proses pemilihan seperti yang dilakukan dalam Teknik random (Saat & Mania, 2020). Dengan jumlah informan ada sembilan yang terdiri atas Sekretaris Lurah Kelurahan Bontang Kuala, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, tiga ketua RT, dan dua orang warga.

Hasil penelitian juga dianalisis menggunakan analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunities, Threats*) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi tata kelola pemerintahan dalam penanganan banjir rob, sehingga diperoleh strategi yang dapat mendukung penguatan ketahanan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam merespon berbagi permasalahan lingkungan yang dihadapi masyarakat, fenomena banjir rob tidak hanya berdampak pada aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi infrastruktur, akses mobilitas, dan kualitas lingkungan permukiman.

fenomena banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala merupakan kondisi yang bersifat berulang dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap aktivitas masyarakat, khusunya pada permukiman masyarakat dan aksesibilitas jalan. Dari hasil observasi, Kelurahan Bontang Kuala telah melakukan beberapa upaya penanganan, seperti perbaikan jembatan yang rusak dan peninggian jembatan, meskipun upaya tersebut masih bersifat terbatas dan bertahap.

Upaya yang dilakukan BPBD tersebut menunjukkan adanya penanggulangan yang bersifat antisipasi dan berbasis sistem informasi. Upaya yang dilakukan juga menekankan pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko seperti kerusakan kendaraan dan ancaman satwa liar.

Selanjutnya, PUPR telah melakukan upaya penanggulangan banjir rob melalui peningkatan infrastruktur fisik. Langkah yang di ambil masih dalam proses perencanaan berupa peninggian badan jalan, pembangunan tanggul, serta prioritas yang difokuskan pada peninggian trotoar di sisi kanan dan kiri jalan.

Gambar 1. Trotoar sebagai jalan alternatif untuk melewati banjir rob



Sumber: dokumentasi penulis, 2026

Sejalan dengan hasil temuan di lokasi penelitian pada saat banjir rob terjadi, masyarakat tidak dapat menggunakan akses jalan utama karena tergenang air laut. Dengan kondisi tersebut, trotoar menjadi jalan alternatif untuk mereka beraktivitas. Dapat dilihat juga dari gambar diatas trotoar tersebut juga mulai tergenang karena intensitas air laut yang semakin tinggi. Maka dari itu prioritas yang di rencanakan oleh Dinas PUPR sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup memandang banjir rob tidak hanya sebagai persoalan bencana alam, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi ekosistem pesisir, khususnya keberadaan mangrove sebagai pelindung alami yang memiliki fungsi penting dalam menahan abrasi serta meredam dampak gelombang air laut. Upaya DLH merujuk kepada aspek ekologis dalam penanggulangan banjir rob, dengan menekankan pentingnya konservasi mangrove.

Dengan demikian, upaya pemerintah dalam menanggulangi banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala sudah menunjukkan adanya upaya dan respon dari berbagai instansi. Kelurahan berupaya menangani kondisi secara langsung di lapangan sekaligus mengusulkan peninggian badan jalan sebagai solusi utama untuk menjaga aksesibilitas wilayah. BPBD melakukan upaya mitigasi melalui penyebaran informasi pasang surut air laut, pemberian imbauan kepada masyarakat, dan peningkatan kewaspadaan terhadap Risiko banjir rob. Sementara itu, Dinas PUPR merencanakan penanganan yang lebih struktural seperti peninggian badan jalan, Pembangunan tanggul, dan peninggian trotoar. Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pendekatan ekologis melalui konservasi mangrove sebagai bentuk perlindungan alam terhadap wilayah pesisir khususnya Kelurahan Bontang Kuala.

Apabila dianalisis menggunakan konsep *good governance* menurut UNDP (*United Nations Development Programe)*, upaya pemerintah tersebut menunjukkan adanya prinsip responsivitas, yaitu adanya respon pemerintah terhadap kebutuhan dan permasalahan yang di alami masyarakat akibat banjir rob. Hal ini dapat dilihat

dari adanya berbagai bentuk penanganan yang dilakukan, baik melalui mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur, maupun perlindungan lingkungan pesisir. Pemerintah juga telah menunjukkan perhatian terhadap kondisi masyarakat dan menyusun berbagai rencana penanganan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Kemudian partisipasi, prinsip partisipasi terlihat dari adanya keterlibatan masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi banjir rob, seperti meninggikan rumah secara mandiri dan mengikuti himbauan terkait mitigasi bencana. Prinsip transparansi juga terlihat dari adanya penyampaian informasi terkait kondisi banjir rob dan pasang surut air laut oleh BPBD, informasi tersebut bertujuan agar masyarakat dapat melakukan antisipasi terhadap Risiko yang mungkin terjadi.

Namun, dari hasil wawancara juga terlihat bahwa sebagian upaya tersebut masih berada pada tahap perencanaan dan belum sepenuhnya terealisasikan secara optimal di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip efektivitas dan efisiensi belum sepenuhnya tercapai. Efektivitas dalam tata kelola pemerintahan menekankan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan harus mampu memberikan hasil nyata sesuai kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, masyarakat masih merasakan banjir rob sebagai permasalahan yang terus berulang, terutama terkait akses jalan yang sering terendam dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Selain itu, kondisi tersebut juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas, karena pemerintah tidak hanya dituntut memiliki perencanaan kebijakan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap realisasi dan hasil dari kebijakan yang telah di rencanakan. Meskipun pemerintah telah memiliki arah kebijakan yang cukup jelas dalam menangani banjir rob, implementasi program yang belum maksimal menunjukkan bahwa hasil kebijakan belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola urusan pemerintah, termasuk penanggulangan bencana dan pembangunan infrastruktur. Undang-undang ini juga menekankan prinsip otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. namun, banyak program masih berada pada tahap perencanaan menunjukkan bahwa pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya optimal.

Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif kewenangan sudah jelas, namun secara implementasi masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan. Dalam prinsip *good governance* kondisi ini juga berkaitan dengan lemahnya akuntabilitas dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah bisa dilihat masih ada beberapa kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Pemerintah sudah

memiliki arah kebijakan yang jelas, tetapi realisasinya masih belum maksimal sehingga penanganan banjir rob belum memberikan dampak signifikan dalam mengurangi masalah yang dialami masyarakat secara berulang.

Masyarakat

Dampak banjir rob tidak hanya merendam rumah, tetapi juga menghambat akses jalan utama, mengganggu aktivitas sekolah, pekerjaan, serta kegiatan ekonomi masyarakat. Meski sebagian kawasan sudah mendapat bantuan turap, tetapi masih belum merata sehingga di daerah yang lebih rendah air tetap meluap dan menggenangi permukiman dan akses jalan.

Terdapat beberapa respon dan sikap dari masyarakat, ada warga yang sudah menerima banjir rob sebagai bagian dari kehidupan pesisir dan merasa terbiasa karena telah terjadi sejak dulu. Namun, tidak sedikit pula yang mengeluhkan kondisi yang semakin sering dan semakin tinggi, terutama karena mengganggu aktivitas. Bagi mereka, meskipun banjir dianggap sebagai faktor alam, masyarakat tetap memerlukan dan mengharapkan penanganan yang lebih serius agar dampaknya tidak terus berulang dan semakin meluas.

kondisi banjir rob masih tergolong cukup terdampak, terutama karena air laut yang masuk ke permukiman serta infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai. Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa upaya penanganan menang sudah ada, seperti pembangunan turap namun belum merata sehingga belum mampu mengatasi permasalahan secara menyeluruh.

Gambar 2. Pembangunan turap yang belum merata



Sumber: dokumentasi penulis, 2026

karakteristik banjir rob di wilayah ini cenderung lebih situasional dan dipengaruhi oleh kombinasi antara curah hujan yang tinggi dan pasang air laut. Artinya, banjir tidak selalu terjadi secara terus menerus, tetapi muncul ketika dua faktor tersebut bertemu. Namun, frekuensi banjir rob mengalami peningkatan dibanding sebelumnya, yang dulu terjadi sekitar dua bulan sekali kini bisa mencapai beberapa kali dalam sebulan.

Banjir rob dipandang sebagai fenomena yang sudah lama terjadi, bahkan dianggap seperti tradisi, namun kini dampaknya semakin mengganggu aktivitas

sehari-hari masyarakat. genangan air tidak hanya mempengaruhi permukiman, tetapi juga menghambat kegiatan seperti sekolah, pekerjaan, dan aktivitas ekonomi UMKM.

Masyarakat berharap adanya solusi konkret dari pemerintah, khususnya pembangunan jalan alternatif yang tidak mudah tergenang. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan utama adalah aksesibilitas yang tetap terjaga saat banjir terjadi, melihat frekuensi banjir yang cukup tinggi dalam satu bulan.

Kemudian, masyarakat bahkan memandang banjir rob dengan dua sisi ada suka dan duka. Namun dampak negatifnya tetap dominan. Permasalahan utama yang dirasakan bukan pada rumah, tetapi pada akses jalan yang sering terendam. Oleh karena itu, harapan masyarakat lebih difokuskan pada peninggian badan jalan sebagai solusi utama agar tetap bisa beraktivitas meskipun banjir rob terjadi.

Dengan begitu masyarakat di Kelurahan Bontang Kuala masih merasakan banjir rob sebagai permasalahan yang terus berulang setiap tahun dan cenderung semakin meningkat. Kondisi ini membuat banjir rob menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang harus dihadapi oleh masyarakat. Bahkan ada yang menganggapnya seperti hal biasa atau sudah menjadi rutinitas, tapi disisi lain kondisi sekarang dirasakan semakin berat karena banjir terjadi lebih sering, lebih tinggi, dan dampaknya makin terasa dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perspektif *good governance* menurut UNDP, kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, karena masalah yang sama masih terus berulang dan cenderung terus meningkat. Hal ini menggambarkan belum tercapainya prinsip efektivitas, karena kebijakan publik seharusnya mampu menyelesaikan masalah, bukan hanya mengelola dampak yang terus berulang. Dengan begitu, menandakan bahwa hasil kebijakan belum memberi dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Dari sisi dampak, masyarakat paling merasakan gangguan pada aspek mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Akses jalan menjadi persoalan utama, karena hampir semua informan menekankan bahwa jalanan yang tergenang menyebabkan aktivitas sekolah, pekerjaan, hingga kegiatan ekonomi menjadi terhambat. Bahkan dalam beberapa kasus, rumah warga sudah tidak terlalu terdampak karena banyak dari mereka yang melakukan adaptasi mandiri dengan meninggikan rumah khususnya pada yang masyarakat yang bertempat tinggal di atas jembatan, tetapi jalan yang terendam justru menjadi masalah yang lebih serius. Ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat, jalanan utama sebagai akses yang digunakan sehari-hari lebih krusial. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk infrastruktur dasar yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, masih terganggunya akses jalan yang menjadi kebutuhan utama

masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik pada infrastruktur belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Selain itu, terdapat juga pendapat bahwa penanganan yang dilakukan pemerintah masih belum merata. Pembangunan turap memang dirasakan manfaatnya, tetapi di sisi lain justru menimbulkan dampak baru, seperti pengalihan aliran air ke wilayah yang lebih rendah sehingga menimbulkan masalah baru. Hal ini membuat masyarakat merasa bahwa penanganannya masih setengah-setengah dan belum benar-benar menyelesaikan masalah.

Masyarakat juga memiliki harapan yang dibutuhkan dalam penanganan banjir rob agar pemerintah dapat melakukan peninggian jalan utama, pembangunan jalan alternatif, sampai usulan untuk pintu air dan jalan lingkar. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang terdampak, tetapi juga memiliki kesadaran terhadap solusi yang dibutuhkan. Dalam prinsip *good governance* menurut UNDP yaitu partisipasi, kondisi ini mencerminkan adanya potensi partisipasi masyarakat. Namun, apabila usulan tersebut belum terealisasi dalam kebijakan, maka prinsip responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat belum berjalan secara optimal.

Maka bisa disimpulkan, masyarakat memang sudah beradaptasi dengan banjir rob, tapi bukan berarti mereka tidak terdampak. Justru sekarang mereka semakin merasakan dampaknya dengan berharap ada penanganan yang lebih baik, terutama yang bisa menyelesaikan persoalan terkait akses jalan tetap aman agar aktivitas tidak terganggu saat terjadi banjir rob karena kenaikan pasang air laut.

Analisis SWOT

Berdasarkan hasil observasi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman mengenai banjir rob yang terjadi di Kelurahan Bontang Kuala diketahui kekuatan yang ditemukan dari terjadinya banjir rob adalah Kelurahan Bontang Kuala dengan sigap memperbaiki infrastruktur yang rusak seperti jembatan yang putus dan kurang tinggi, para instansi pemerintah juga saling berkoordinasi untuk mengani situasi saat terjadi kondisi darurat akibat banjir rob, informasi tentang pasang surut air laut disebarkan kepada masyarakat sebagai langkah peringatan dini, inisiatif masyarakat untuk beradaptasi dengan cara meninggikan rumahnya agar tidak terkena banjir.

Selain kekuatan, banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala memiliki kelemahan yang harus di perhatikan. Kelemahan ini dapat digunakan sebagai evaluasi dalam penanganan banjir rob yang terjadi. Yang menjadi kelemahan adalah keterbatasan anggaran untuk peninggian badan jalan secara menyeluruh, terbatasnya kewenangan pemerintah kota karena status jalan nasional, cakupan program bantuan yang belum merata, Penanganan infrastruktur masih bertahap dan belum merata, serta drainase tertutup akibat pembangunan masyarakat.

Kemudian peluang, merupakan potensi yang dimiliki suatu daerah untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Peluangnya antara lain, status Kelurahan Bontang Kuala sebagai salah satu ikon wisata laut di Kota Bontang, potensi ekonomi pesisir yang kuat, dukungan CSR *(Corporate Social Responbility)* perusahaan dalam rehabilitasi mangrove, dan kolaborasi dengan akademisi dan sekolah adiwiyata untuk edukasi lingkungan berkelanjutan.

Dari peluang maka akan muncul ancaman, ancaman yang terjadi banyak dirasakan masyarakat Kelurahan Bontang Kuala antara lain kenaikan air laut secara terus menerus, mengganggu mobilitas dan ekonomi, membahayakan keselamatan dengan adanya satwa liar seperti buaya, kurasakan fasilitas, infrastruktur, dan kondisi lingkungan pesisir yang terus mengalami kerusakan.

Matriks SWOT

Tabel 5. Matriks SWOT

Internal / Eksternal	**Strenght (Kekuatan)**	**Weakness (Kelemahan)**
	1. Respon cepat untuk perbaikan kecil. 2. Koordinasi antar instansi. 3. informasi pasang surut sebagai peringatan dini. 4. masyarakat meninggikan rumah secara mandiri.	1. Anggaran dan Kewenangan terbatas. 2. Bantuan belum merata. 3. Penanganan infrastruktur masih bertahap dan belum merata. 4. Drainase tertutup akibat pembangunan masyarakat.
Opportunities (Peluang)	**SO**	**WO**
1. Prioritas pembangunan ikon wisata laut. 2. Potensi ekonomi pesisir yang kuat. 3. Dukungan untuk rehabilitasi mangrove 4. Kolaborasi edukasi lingkungan.	1. Menggabungkan respon cepat dan kerja sama antar instansi dalam program pembangunan kawasan wisata pesisir. 2. Mendorong penyampaian jadwal potensi pasang air laut	1. Melakukan edukasi lingkungan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menanggulangi banjir rob. 2. Melaksanakan program rehabilitasi mangrove sebagai solusi alternatif untuk

	melalui berbagai media komunikasi masyarakat untuk mendukung penyesuaian aktivitas serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap banjir rob. 3. Mendorong masyarakat ikut serta dalam rehabilitasi mangrove melalui kerja sama dengan CSR dan program edukasi lingkungan.	perlindungan alami pesisir. 3. Mengoptimalkan pembangunan wisata pesisir untuk membangun peningkatan infrastruktur.
Threats (Ancaman) 1. Dampak jangka panjang kenaikan air laut. 2. Ancaman keselamatan dari satwa liar. 3. Aktivitas dan ekonomi terganggu. 4. Fasilitas dan infrastruktur cepat rusak. 5. Lingkungan pesisir semakin memburuk.	**ST** 1. Mengoptimalkan sistem peringatan dini untuk mengurangi dampak banjir rob dan gangguan aktivitas masyarakat. 2. Memperkuat kerja sama antar instansi dalam menangani ancaman satwa liar saat banjir terjadi. 3. Mendorong masyarakat beradaptasi secara mandiri dengan meninggikan rumah sebagai langkah jangka panjang menghadapi kenaikan air laut.	**WT** 1. Menentukan skala prioritas bantuan dan wilayah terdampak untuk memastikan penanganan lebih tepat sasaran. 2. Menyusun masterplan dan menerapkan penanganan prioritas pada titik rawan banjir rob untuk mengurangi dampak kenaikan air laut. 3. meningkatkan sistem perlindungan dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman satwa liar.

A. Strategi SO (*Strenght* dan *Opportunities*)

1. Menggabungkan respon cepat dan kerja sama antar instansi dalam program pembangunan kawasan wisata pesisir

   Kelurahan Bontang Kuala sudah cukup tanggap dalam menghadapi banjir rob, ketika jalanan ada yang rusak langsung diperbaiki, jembatan yang kurang tinggi diusulkan untuk ditinggikan, serta kendaraan besar dari Damkar diturunkan untuk membantu warga berangkat kerja atau sekolah saat jalanan terendam. Selain itu, koordinasi antar instansi juga sudah dilakukan ketika kondisi darurat terjadi.

   Kondisi ini menjadi kekuatan yang bisa dikembangkan lebih jauh, apalagi kelurahan Bontang Kuala saat ini dikenal sebagai ikon wisata pesisir Kota Bontang. Aktivitas ekonomi seperti pelabuhan, kafe, dan usaha masyarakat pesisir cukup ramai. Artinya, ada peluang besar untuk menjadi penanganan banjir rob sebagai bagian dari pembangunan kawasan wisata.

   Strateginya adalah menggabungkan pola respon cepat yang sudah ada dengan perencanaan pembangunan wisata pesisir yang lebih baik. Jadi bukan hanya bertindak saat banjir datang saja, dengan kerja sama yang lebih terstruktur antara Kelurahan, PUPR, DLH, BPBD, dan pihak lainnya, pembangunan wisata bisa berjalan seiring dengan upaya memperkuat ketahanan wilayah khususnya pada pesisir Bontang Kuala.

2. Mendorong penyampaian jadwal potensi pasang air laut melalui berbagai media komunikasi masyarakat untuk mendukung penyesuaian aktivitas serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap banjir rob.

   Informasi tentang pasang surut air laut juga sudah disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk peringatan dini ini merupakan kekuatan penting karena masyarakat tidak sepenuhnya tidak tahu kapan risiko rob terjadi.

   Melihat juga Kelurahan Bontang Kuala menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi, informasi pasang surut ini seharusnya bisa dimanfaatkan lebih maksimal. Misalnya, jadwal pasang tinggi diumumkan secara rutin agar masyarakat bisa menyesuaikan aktivitas mereka dan bisa lebih waspada ketika banjir rob.

   Strategi ini penting agar banjir rob tidak selalu membuat aktivitas ekonomi dan pendidikan lumpuh total. Jika informasi dikelola dengan baik melalui grup warga, media sosial kelurahan, atau pengumuman rutin, dampak rob bisa dikurangi meskipun belum bisa dihilangkan sepenuhnya.

3. Mendorong masyarakat ikut serta dalam rehabilitasi mangrove melalui kerja sama dengan CSR dan program edukasi lingkungan

Peluang kerja sama dengan perusahaan melalui program CSR, ini menjadi peluang besar untuk memperkuat perlindungan lingkungan pesisir. Masyarakat Bontang Kuala sebenarnya sudah menunjukkan kemampuan beradaptasi, misalnya dengan meninggikan rumah secara mandiri, artinya masyarakat punya kesadaran untuk bertahan dari banjir rob. Kesadaran ini bisa diarahkan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan bersama, salah satunya rehabilitasi mangrove.

Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami dari gelombang dan abrasi. Jika penanaman mangrove dilakukan secara berkelanjutan dan dijaga bersama, dampak rob bisa ditekan dalam jangka panjang. Melalui kerja sama CSR, dukungan pemerintah, dan edukasi lingkungan yang terus dilakukan, masyarakat bisa dilibatkan secara aktif agar tidak hanya menanam tetapi juga menjaga mangrove tersebut.

B. Strategi WO (*Weakness* dan *Oppotunities*)

1. Melakukan edukasi lingkungan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menanggulangi banjir rob

   Selama ini salah satu penyebab banjir rob semakin parah bukan hanya karena faktor alam, tetapi juga karena kondisi lingkungan yang kurang terjaga dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan pesisir.

   Edukasi lingkungan perlu dilakukan secara rutin dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya kegiatan gotong royong, penyuluhan yang menjelaskan hubungan antara sampah, drainase, dan banjir rob. edukasi juga perlu menggunakan contoh nyata yang dirasakan masyarakat sehingga mereka lebih mudah memahami bahwa tindakan kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan atau menjaga saluran air tetap bersih dapat berdampak langsung pada genangan saat banjir rob terjadi.

   Strategi ini penting karena penanganan banjir rob tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pemerintah, terutama di tengah keterbatasan anggaran dan pembangunan infrastruktur yang masih bertahap. Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, upaya penanggulangan dapat dilakukan secara bersama-sama sehingga dampak banjir rob dapat ditekan dan lingkungan pesisir menjadi lebih terjaga secara berkelanjutan.

2. Melaksanakan program rehabilitasi mangrove sebagai solusi alternatif untuk perlindungan alami pesisir

   Kondisi wilayah pesisir yang terus mengalami tekanan akibat banjir rob menunjukkan bahwa perlindungan alamu masih belum optimal, sementara pembangunan infrastruktur seperti tanggul atau peninggian jalan membutuhkan biaya besar dan waktu yang tidak singkat. Melihat kondisi

tersebut, program rehabilitasi mangrove perlu dilakukan secara lebih terencana dan berkelanjutan, tidak hanya sebagai kegiatan penanaman sesaat. Penanaman mangrove dapat difokuskan pada titik-titik rawan terdampak rob, dengan melibatkan masyarakat secara langsung agar mereka juga ikut menjaga dan merawat lingkungan.

Program ini penting karena mangrove memiliki fungsi alami sebagai penahan gelombang, mengurangi abrasi, serta membantu meredam dampak banjir rob. Dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur, rehabilitasi mangrove cenderung lebih hemat biaya dan memberikan manfaat jangka panjang. Selain itu, keberadaan mangrove juga dapat membuka peluang tambahan seperti pengembangan wisata alam atau pemanfaatan hasil pesisir, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan lingkungan, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Mengoptimalkan pembangunan wisata pesisir untuk membangun peningkatan infrastruktur

   Keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan Bontang Kuala, apalagi penanganan banjir rob yang membutuhkan biaya besar dan dilakukan secara bertahap. Akibatnya, perbaikan jalan, turap, dan fasilitas pendukung lainnya belum merata dan belum sepenuhnya mampu mengurangi dampak banjir rob. Dan di sisi lain kawasan pesisir Bontang Kuala memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata yang mulai mendapat perhatian dan menjadi prioritas pengembangan.

   Dengan begitu pembangunan wisata pesisir seharusnya tidak hanya berfokus pada peningkatan daya tarik wisata, tetapi juga diarahkan untuk mendukung perbaikan infrastruktur dasar. Misalnya, pengembangan kawasan wisata dapat diikuti dengan peninggian akses jalan, perbaikan sistem drainase, pembangunan turap, dan penataan kawasan pemukiman. Dengan cara ini pembangunan yang dilakukan tidak hanya mendukung aktivitas pariwisata, tetapi juga secara langsung membantu mengurangi dampak banjir rob yang dirasakan masyarakat.

   Ketika kawasan pesisir berkembang sebagai destinasi wisata, peluang masuknya dukungan dari berbagai pihak akan semakin besar, dengan begitu dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang sebelumnya terkendala sehingga tidak hanya meningkatkan daya tarik wilayah, tetapi juga membantu pembangunan upaya penanganan banjir rob secara bertahap.

C. Strategi ST (*Strenght* dan *Treats*)

1. Mengoptimalkan sistem peringatan dini untuk mengurangi dampak banjir rob dan gangguan aktivitas masyarakat

Saat ini pemerintah sudah banyak menyebarkan informasi tentang pasang surut air laut dan rutin memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini sebenarnya sudah menjadi kekuatan yang cukup apalagi dari hasil wawancara diketahui bahwa banjir rob sekarang semakin tinggi dan semakin sering terjadi, bahkan bisa beberapa kali dalam satu bulan.

Karena banjir rob sangat mengganggu aktivitas maka informasi pasang surut ini harus dioptimalkan, bukan hanya sebatas pemberitahuan umum. Informasi pasang surut bisa disampaikan lebih terjadwal. Misalnya dengan membuat kalender terkait pasang surut air laut ini yang dibagikan kepada masyarakat melalui RT, grup komunikasi, dan media sosial kelurahan.

Dengan sistem yang terstruktur, masyarakat tidak hanya menerima informasi tetapi juga tahu langkah apa yang harus dilakukan sebelum banjir rob terjadi. Strategi ini penting agar banjir rob tidak selalu menyebabkan kepanikan dan gangguan besar terhadap aktivitas ekonomi maupun pendidikan.

2. Memperkuat kerja sama antar instansi dalam menangani ancaman satwa liar saat banjir terjadi

   Saat banjir rob terjadi, tidak hanya genangan air yang menjadi masalah, tetapi juga muncul satwa liat seperti buaya atau hewan lainnya yang terbawa aur dan masuk ke pemukiman masyarakat. Kondisi ini menimbulkan rasa takut dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Namun, penanganan selama ini cenderung masih belum terkoordinasi secara jelas.

   Untuk itu diperlukan penguatan kerja sama antar instansi, seperti Kelurahan, BPBD, dinas terkait, serta aparat keamanan setempat dengan pembagian peran yang lebih jelas ketika ada laporan kemunculan satwa liar.

   Selain itu, dapat membuat mekanisme respon cepat berbasis kontak darurat yang di ketahui masyarakat sehingga tidak panik atau mencoba menangani sendiri tanpa keahlian. Sosialisasi sederhana mengenai langkah yang harus dilakukan saat menemukan satwa liar juga penting agar masyarakat memahami prosedur yang aman.

   Dengan adanya koordinasi yang lebih terstruktur dan peran yang jelas, penanganan ancaman satwa liar saat banjir tidak bersifat spontan, tetapi menjadi bagian dari sistem kesiapsiagaan yang terencana dalam menghadapi kondisi darurat.

3. Mendorong masyarakat beradaptasi secara mandiri dengan meninggikan rumah sebagai langkah jangka panjang menghadapi kenaikan air laut

   Kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim merupakan ancaman jangka panjang yang sulit dihentikan dalam waktu dekat. Durasi banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala makin meningkat dan sering terjadi.

Jika kondisi ini terus berlanjut maka penyelesaian untuk jangka pendek saja tidak akan cukup.

Dengan begitu masyarakat Kelurahan Bontang Kuala telah menunjukkan kemampuan adaptasi mandiri dengan meninggikan rumah. Ini adalah kekuatan internal yang sangat penting karena menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah.

Strateginya adalah memperkuat dan memperluas pola adaptasi sebagai solusi jangka panjang. Pemerintah dapat memberikan pemberitahuan terkait standar ketinggian rumah yang aman dari genangan, serta memperluas jangkauan bantuan agar tidak hanya menjangkau sebagian kecil masyarakat saja. Dengan rumah yang lebih tinggi dari level genangan banjir rob maka risiko kerusakan akibat air laut yang berkadar garam tinggi dapat dikurangi.

Adaptasi mandiri ini bukan hanya solusi individu, tetapi dapat menjadi bagian dari perencanaan kawasan pesisir yang lebih tahan terhadap perubahan iklim. Jika dilakukan secara bertahap dan merata, maka dalam jangka panjang kerentanan wilayah terhadap banjir rob akan semakin berkurang.

D. Strategi WT (*Weakness* dan *Treats*)

1. Menentukan skala prioritas bantuan dan wilayah terdampak untuk memastikan penanganan lebih tepat sasaran

   Keterbatasan anggaran membuat bantuan yang diberikan belum merata dan belum sepenuhnya tepat sasaran. Beberapa wilayah yang terdampak cukup parah terkadang belum mendapatkan penanganan yang optimal, kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran bantuan masih belum berbasis tingkat kerentanan wilayah secara jelas.

   Dengan kondisi tersebut penentuan skala prioritas menjadi hal yang penting untuk dilakukan agar penganan lebih efektif. Pemerintah perlu melakukan pemetaan wilayah terdampak secara lebih rinci, misalnya dengan mengidentifikasi daerah yang paling sering tergenang, tingkat ketinggian air, serta jumlah masyarakat yang terdampak. Data tersebut kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan wilayah mana yang harus didahulukan dalam penyaluran bantuan, baik dalam bentuk logistik, perbaikan infrastruktur, maupun penanganan darurat. Dengan adanya skala prioritas yang jelas, bantuan dapat disalurkan secara lebih adil dan tepat sasaran sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam penanganan.

2. Menyusun masterplan dan menerapkan penanganan prioritas pada titik rawan banjir rob untuk mengurangi dampak kenaikan air laut

   Penanganan banjir rob selama ini masih cenderung bersifat bertahap, sehingga hasilnya belum mampu memberikan perlindungan yang merata.

Beberapa titik sudah diperbaiki tapi disisi lain masih ada beberapa titik yang belum tersentuh penanganan. Hal ini terjadi karena belum ada rencana besar yang benar-benar jadi acuan bersama, sehingga penanganannya terkesan berjalan sendiri-sendiri dan belum saling terhubung.

Dengan kondisi tersebut, penting untuk menyusun masterplan atau rencana besar yang bisa jadi panduan ke depan. Masterplan ini berisi gambaran wilayah mana saja yang paling rawan, mana yang harus di dahulukan, dan bagaimana tahapan penanganannya, mulai dari jangka pendek sampai jangka panjang. Selain itu, penanganan juga perlu difokuskan terlebih dahulu ke titik-titik yang paling sering terdampak, misalnya area pemukiman yang selalu tergenang atau akses jalan utama yang sering terendam banjir rob.

Penyusunan masterplan ini penting supaya penanganan banjir rob tidak lagi bersifat sementara atau hanya reaksi saat kejadian. Dengan adanya rencana yang jelas, setiap pembangunan bisa lebih terarah dan saling mendukung. Fokus pada titik rawan juga membuat penggunaan anggaran jadi lebih efektif, sehingga dampak kenaikan air laut bisa dikurangi secara bertahap meskipun tidak bisa langsung dihilangkan sepenuhnya.

3. meningkatkan sistem perlindungan dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman satwa liar

kemunculan satwa liar seperti buaya saat air laut pasang hingga masuk ke permukiman membuat batas antara habitat alami dan lingkungan warga menjadi tidak jelas, terutama di wilayah yang dekat dengan perairan lepas atau memiliki genangan yang cukup dalam. Kondisi ini tentu meningkatkan risiko keselamatan, terlebih ketika aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti biasa saat banjir rob terjadi.

Kewaspadaan masyarakat perlu diperkuat dengan pendekatan yang sederhana dan sesuai dengan situasi di lapangan. Misalnya, masyarakat bisa mulai membatasi aktivitas di luar rumah saat air sedang tinggi. Pemasangan tanda peringatan di titik rawan serta pengetahuan dasar tentang ciri-ciri keberadaan buaya juga dapat membantu masyarakat lebih waspada.

Ancaman buaya bukan hanya potensi bahaya, tetapi sudah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Tanpa kewaspadaan yang cukup, risiko kejadian yang membahayakan bisa meningkat, terutama bagi anak-anak atau warga yang beraktivitas di sekitar genangan air. Dengan meningkatkan sistem perlindungan kewaspadaan bersama, masyarakat dapat mengurangi risiko tersebut, sehingga tetap bisa menjalankan aktivitas dengan lebih aman di tengah kondisi banjir rob.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam menanggulangi banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala sudah menunjukkan adanya respon dan keterlibatan dari berbagai insransi,baik dari pihak kelurahan maupun organisasi perangkat daerah terkait. Upaya tersebut mencakup perbaikan infrastruktur secara bertahap, penyampaian informasi mitigasi bencana, perencanaan peninggian badan jalan dan pembangunan tanggul, serta pendekatan ekologis melalui konservasi mangrove. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki perhatian dan arah kebijakan dalam menangani permasalahan banjir rob.

Namun dalam implementasinya upaya penanganan banjir rob belum sepenuhnya dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah masih bersifat bertahap dan belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan penanganan, khususnya terkait permasalahan akses jalan yang sering terendam akibat banjir rob. Kondisi tersebut menyebabkan manfaat dari program yang telah dilaksanakan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Akibatnya banjir rob masih dirasa menjadi masalah yang terus berulang dan mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari.

Masyarakat mengakui adanya beberapa bentuk penanganan yang telah dilakukan, seperti pembangunan turap dan perbaikan infrastruktur, tetapi permasalahan utama khususnya terkait akses jalan yang sering terendam. Kondisi ini menunjukkan meskipun pemerintah telah berupaya tetapi masyarakat masih merasakan dampak banjir rob yang terus berulang bahkan intensitasnya semakin meningkat.

Di sisi lain, masyarakat juga menunjukkan adanya kemampuan adaptasi mandiri yang baik seperti melakukan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan dan mempertahankan aktivitas sehari-haru ditengah banjir rob. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya pasif.

Selain itu, dalam penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang hanya berfokus di Kelurahan Bontang Kuala serta penggunaan pendekatan kualitatif sehingga belum mengukur secara kuantitatif efektivitas penanganan dan dampak sosial-ekonomi banji rob.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis SWOT, startegi yang dapat dikembangkan pemerintah bersama masyarakat dalam membangun ketahanan wilayah pesisir terhadap banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala Adalah strategi yang menggabungkan kekuatan dan peluang (strategi SO). Strategi ini dipilih karena mampu memanfaatkan kekuatan serta peluang yang dimiliki, strategi ini tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas penanganan banjir rob, tetapi juga membantu

mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sehingga berbagai keterbatasan dalam pelaksanaanya dapat diminimalkan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai startegi tata kelola pemerintahan dalam membangun ketahanan wilayah pesisir terhadap banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala masih memiliki keterbatasan, maka rekomendasi yang di berikan sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan banjir rob agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan mampu menjangkau seluruh wilayah yang terdampak. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap kondisi lingkungan pesisir dan melakukan pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan guna mengurangi risiko kerusakan dan gangguan yang ditimbulkan oleh banjir rob.
2. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam menjaga lingkungan dan fungsi drainase, serta ikut serta aktif dalam kegiatan dalam upaya pelestarian lingkungan pesisir. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap risiko yang ditimbulkan akibat banjir rob.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas implementasi penanganan banjir rob di wilayah pesisir dengan menyoroti kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi peningkatan risiko banjir akibat perubahan iklim dan kenaikan muka air laut.

IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis berupa rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi antar instansi melalui pemantauan titik genangan dan penyampaian informasi pasang surut secara terpadu, meningktakan pengelolaan infrastruktur pesisir melalui pemetaan dan penentuan prioritas perbaikan pada titik yang paling terdampak, serta melibatkan masyrakat dalam pemantauan dan pelaporan kondisi banjir rob. Strategi yang dihasilakn melalui analisis SWOT dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas program, penyusunan kebijakan, dan perencanaan pembangunan wilayah pesisir yang adaptif dan berkelanjutan.

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *good governance* relevan digunakan untuk menjelaskan tata kelola pemerintahan dalam membangun ketahanan wilayah pesisir terhadap banjir rob. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa koordinasi, partisipasi masyarakat, transparansi informasi, dan responsivitas pemerintah menjadi unsur penting dalam pelaksanaan penanganan banjir rob. Namun, dalam konteks wilayah pesisir, penerapan prinsip tersebut perlu diperkuat dengan aspek adapatasi terhadap kondisi lingkungan dan risiko bencana. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengubah konsep *good governance*, tetapi menunjukkan

perlunya penguatan penerapan agar lebih responsive terhadap karakteristik dan risiko wilayah pesisir.

REFERENCES

Abdussamad, H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

Achmad, M., & Baharuddin Zubakhrum, M. (2024). *Administrasi Pemerintahan Daerah*.

Bariroh, G., & Surtikanti, H. K. (2024). Strategi masyarakat pesisir Margolinduk dalam penanganan banjir rob serta implikasi terhadap sikap peduli lingkungan. *Applied Environmental Science*, *1*(2). https://doi.org/10.61511/aes.v1i2.2024.303

Br. Sembiring, T., Ady Bakri, A., Yei Andrias, M., & Maria Fatriani, R. (2023). *SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH*.

Cahyono, J., Fadina, S. B., & Kusuma Arafia, A. D. (2024). Pengabdian Kepada Masyarakat Implementasi Hukum dalam Tata Kelola Pemerintahan. In *Jurnal Bhakti Adhyaksa* (Vol. 1, Number 2).

Choirulsyah, D., & Azhar. (2024). Implementasi Etika Administrasi Publik: Langkah Utama dalam Menciptakan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *9(3)*, 195–203. https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/3757

Eka Sarveleni, A., Basri Tarmizi, H., & Siddik Thoha, A. (2023). Analysis of adaptation and mitigation recommendations for Banjir rob disasters in the coastal area of Belawan, Medan. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, *4*(3), 839–845. https://doi.org/10.54660/.ijmrge.2023.4.3.839-845

Gunawan, H. (2023). Analisis Peran Masyarakat Pesisir terhadap Ketahanan Pasca Bencana Alam di Desa Pesisir. *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan* https://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpt/article/view/12062

Hidayah, N., Sri Nugroho, H., Kunci, K., Rob, B., Aktor, K., & Aktor, K. (2024). *PENGEMBANGAN MODEL MITIGASI BENCANA BANJIR ROB DI KELURAHAN KANDANG PANJANG, KOTA PEKALONGAN (ANALISIS KAPASITAS DAN KERENTANAN AKTOR PADA MITIGASI BENCANA BANJIR ROB)*.

Imam, Muh. N., Manaf, M., & Aksa, K. (2025). Mitigasi dan Adaptasi Bencana Banjir Rob di Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. *Urban and Regional Studies Journal*, *7*(2), 224–235. https://doi.org/10.35965/ursj.v7i2.6051

Irfani, K., Naziyah, F. A., & Widiyarta, A. (2021). MODEL ANALISIS SWOT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA DPMPTSP PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Administrasi Negara*, *27*(1).

Miftakhudin, S. (2021). *STRATEGI PENANGANAN BANJIR ROB KOTA PEKALONGAN* (Vol. 19, Number 1).

Musa, B., & Lukman Hakim, M. (2020). Analisis Tipologi dan Pengembangan Kawasan Pesisir Kota Bontang (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Bontang Kuala dan Kelurahan Guntung). *Journal of Governance Innovation*, *2*(1), 1–21. https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.417

Nada, R. I., Saputra, H., & Hariyono, H. (2025). ADAPTASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENGHADAPI BANJIR ROB DI WILAYAH PESISIR LAMONGAN. *JOURNAL OF SCIENCE* https://www.jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/2779

Nadya, N., & Salim, A. (2023). Pengaruh sea level rise di wilayah perkotaan indonesia. *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*. http://journal-old.unhas.ac.id/index.php/SENSISTEK/article/view/24248

Nurhidayat, I. (2023). PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, *1*(1), 40–52. https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-govHalaman40

Permatasari, I., Mulyawan, R., & Taryana, A. (2024). *STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DALAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI APLIKASI E-OFFICE (STUDI PADA KECAMATAN CICALENGKA TAHUN 2022)*. *4*.

petakita.bontangkota.go.id. (2025a). Peta Rawan Bencana Berbasis RT Kota Bontang. https://petakita.bontangkota.go.id/dashboard/36

petakita.bontangkota.go.id. (2025b). Kondisi Dan Permasalahan Banjir Pemerintah Kota Bontang. https://petakita.bontangkota.go.id/dashboard/38

Saat, S., & Mania, S. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian* (Muzakkir, Ed.). PUSAKA ALMAIDA.

Sahana, W. (2021). *PENANGANAN BANJIR ROB DI KOTA TANJUNGBALAI*.

Sasoko, D. M., & Mahrudi, I. (2022). *TEKNIK ANALISIS SWOT DALAM SEBUAH PERENCANAAN KEGIATAN*.

Sauda, R. H., Nugraha, A. L., & Hani'ah, H. (2019). Kajian pemetaan kerentanan banjir rob di kabupaten pekalongan. *Jurnal Geodesi Undip*. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/22777

Suhardi, & Panjaitan, P. (2025). *Analisis Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Nasional*.

Suriadi, H. (2025). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia: Kajian Teoretis atas Prinsip, Tantangan dan Strategi Implementasi. In *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Pendidikan* (Vol. 1, Number 1). https://jurnal.suriaacademicpress.com/index.php/JISEP

Syahputra, D., & Bakhri, A. (2025). Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Evaluasi Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Era Pemerintahan Digital. *Jurnal Thengkyang*, *10 (02)*, 76–96.

Sylvia, R., & Hayati, D. (2023). Analisis SWOT dalam Menentukan Strategi Pemasaran Produk INDOSAT pada PT X. *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *16*(1), 120–140.

Waruwu, M. (2023). *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*.

Wibawa, K. C. S. (2019). Urgensi keterbukaan informasi dalam pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. *Administrative Law and Governance Journal*. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/5080

Widana, I. (2022). Analisis Faktor Penyebab dan Strategi Mitigasi Bencana Banjir Rob di Kota Banda Aceh. *Jurnal Kewarganegaraan*. https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4592

Zebua, N. R. (2024). ANALISIS SWOT PADA USAHA RUMAH MAKAN NASIONAL. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, *Vol. 7 No. 2*.

Zulfan, F. I., & Mannar, D. G. (2024). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR ROB DI KOTA SEMARANG*.